

5-16-2017

Aplikasi Soft System Methodology dalam Analisis Diplomasi Angkatan Laut Indonesia melalui Pengiriman Satgas Maritim TNI Pada Misi UNIFIL MTF

Trio Sirmareza

Department of Defense Diplomacy, Indonesia Defense University, sirmareza.trio@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), [International and Area Studies Commons](#), [International Relations Commons](#), [Law Commons](#), and the [Political Theory Commons](#)

Recommended Citation

Sirmareza, Trio (2017) "Aplikasi Soft System Methodology dalam Analisis Diplomasi Angkatan Laut Indonesia melalui Pengiriman Satgas Maritim TNI Pada Misi UNIFIL MTF," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 19 : No. 1 , Article 5.

DOI: 10.7454/global.v19i1.150

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol19/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

APLIKASI *SOFT SYSTEM METHODOLOGY*
DALAM ANALISIS DIPLOMASI ANGKATAN LAUT INDONESIA
MELALUI PENGIRIMAN SATGAS MARITIM TNI PADA MISI UNIFIL MTF

Trio Sirmareza

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

E-mail: sirmareza.trio@gmail.com

Abstract

Artikel ini membahas partisipasi Indonesia dalam UNIFIL MTF sebagai cara negara mengaktualisasikan diplomasi angkatan lautnya. Artikel ini berusaha menjelaskan motif Indonesia bergabung dalam UNIFIL MTF dengan menggunakan Metodologi soft-system berdasarkan teori Diplomasi Angkatan Laut. Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, artikel ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan teoretis dan metodologis yang kerap luput dalam kajian terdahulu mengenai topik ini. Salah satu motif yang berhasil diidentifikasi dalam artikel ini adalah menjalankan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia dan untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat global. Artikel menyimpulkan dan menawarkan rekomendasi agar Indonesia dapat terus meningkatkan kapabilitas gugus tugas maritimnya guna berfungsi secara optimal dalam menepati komitmen sesuai dengan motif di atas.

Keywords

Diplomasi Angkatan Laut, Gugus Tugas Maritim TNI Angkatan Laut, Soft System Methodology.

Abstract

This article discusses Indonesia's participation in UNIFIL MTF, as a way for the country to exercise its naval diplomacy. Using Ken Booth's theory of naval diplomacy as analytical framework and employing the Soft System Methodology model, this article seeks to explain Indonesia's motives for joining UNIFIL MTF, namely the maintenance of the world peace as stipulated by the country's constitution and concomitantly, Indonesia's interest to enhance its global role as middle power. The application of naval diplomacy and Soft System Methodology in this article provides a theoretical and methodological-informed analysis in scrutinising Indonesia's participation in international peacekeeping operation. By doing so, this article attempts to fill the lacuna in the existing body of works which commonly neglect the theoretical basis and/or sound methodological framework in their observation and evaluation concerning the topic at hand. The article finds that Indonesian maritime task force in UNIFIL MTF has flexibility, mobility, projection ability and access potential to carry out Indonesia's diplomatic agenda. However, Indonesia still needs to consider improving the capacity of its maritime task force in order for it to function as maximum signifier for Indonesia's prestige and foreign policy commitment.

Keywords

Naval Diplomacy, Maritime Task Force of Indonesian National Defense Force, Soft System Methodology.

PENDAHULUAN

United Nations Interim Force in Lebanon - Maritim Task Force (UNIFIL MTF) adalah operasi perdamaian maritim PBB yang pertama di dunia. Misi ini dimulai pada Oktober 2006 atas permintaan pemerintah Lebanon dengan tujuan mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam mengawasi laut teritorialnya agar terhindar dari masuknya senjata-senjata ilegal maupun material-material senjata melalui jalur laut menuju Lebanon. Operasi UNIFIL MTF juga difokuskan untuk melakukan patroli di sepanjang *line of buoy* antara Israel dan Lebanon.¹ Aspek penting lain dari operasi UNIFIL MTF ini adalah pelatihan yang diberikan kepada Angkatan Laut Lebanon yang bertujuan untuk membekali pasukan agar dapat melakukan tugas-tugas pengawasan teritorial laut mereka sendiri pada masa yang akan datang seperti yang dilaksanakan oleh MTF. Secara umum, UNIFIL MTF adalah satuan tugas yang menjadi bagian dari keseluruhan mandat UNIFIL.

Dalam misi UNIFIL MTF, Indonesia turut serta mengirim KRI berikut awak dan pasukannya ke perairan Lebanon mulai dari tahun 2009 hingga saat ini di bawah payung hukum Keppres No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon. Sampai dengan tahun 2016, Indonesia telah mengirimkan sembilan Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia (Satgas Maritim TNI) dengan kekuatan utama dari TNI AL.

Pengiriman Satgas Maritim TNI dalam perspektif petinggi Angkatan Laut dan pengambil kebijakan selalu diasosiasikan sebagai sebuah upaya diplomasi. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, “Tugas yang dilaksanakan oleh Satgas Maritim TNI dalam rangka mengemban amanat UUD 1945 adalah wujud nyata naval diplomacy (Koarmatim, 2015).”

Satgas Maritim TNI sebagai unsur TNI AL dalam hal ini telah memerankan fungsi diplomasi, yang lebih dikenal dengan diplomasi angkatan laut (*naval diplomacy*). Konsep diplomasi angkatan laut ini relevan dengan TNI AL sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2005 tentang TNI pada pasal 9c di mana TNI AL memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Lebih lanjut, fungsi diplomasi tersebut dapat ditelusuri melalui tulisan Ken Booth *Navies and Foreign Policy* bahwa Angkatan Laut memiliki tiga peran (*trinity of naval functions*), yaitu peran militer, polisionil dan diplomasi (Booth, 1977, 16).

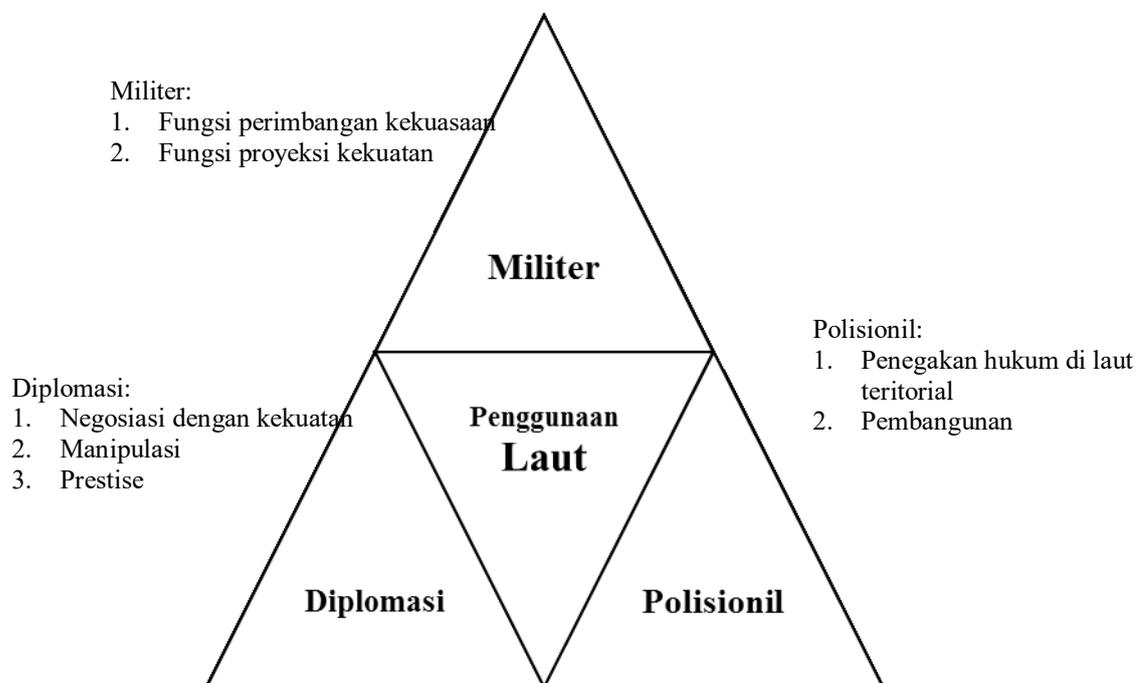
Meskipun Satgas Maritim TNI digadang sebagai instrumen diplomasi Indonesia, belum ada kajian untuk mengevaluasi pengiriman Satgas Maritim TNI tersebut ditinjau dari perspektif diplomasi angkatan laut itu sendiri. Tulisan yang dielaborasi dari

penelitian ini menawarkan *Soft System Methodology* sebagai kerangka metodologis untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan saran peningkatan dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. SSM merupakan prosedur penelitian kualitatif berbasis *system thinking* dan *system concept* yang berhubungan dengan *human activity system*. Metodologi ini dipergunakan untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pemangku kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperoleh satu gagasan konseptual baru untuk melakukan transformasi dari fenomena faktual (Hardjosoekarto, 2012). Penggunaan SSM dalam kajian ini memberikan kesempatan untuk menjawab persoalan-persoalan teoretis sekaligus memberikan saran tindakan yang dibutuhkan pemangku kepentingan.

METODOLOGI

Analisis Diplomasi Angkatan Laut melalui *Soft System Methodology*

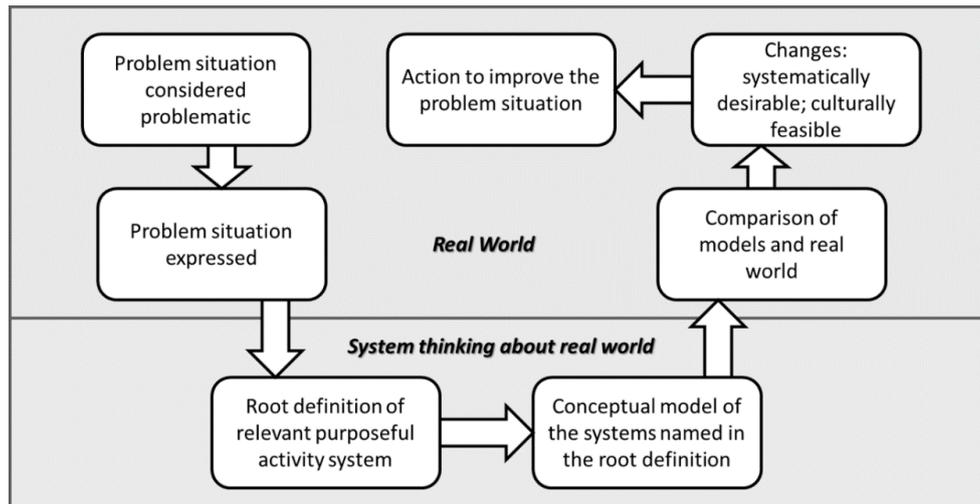
Kerangka intelektual utama dalam tulisan ini adalah teori *naval diplomacy* yang dikemukakan oleh Ken Booth. Gagasan Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* tentang trinitas fungsi angkatan laut adalah karya yang sangat signifikan sehingga telah banyak dipergunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di berbagai negara. Menurut Booth, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi yang secara ilustratif dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Trinitas Fungsi Angkatan Laut (Booth, 1977, 16)

Fungsi diplomasi adalah fungsi paling khas dari Angkatan Laut. Fungsi ini berkaitan dengan manajemen kebijakan luar negeri melalui pengerahan kekuatan Angkatan Laut secara terbatas. Diplomasi angkatan laut pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap *prestige* yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai suatu bentuk diplomasi angkatan laut penting dilakukan mengingat dampak yang dapat memberikan makna berbeda-beda (Booth, 1977, hal. 29). Menurut Ken Booth (1977, hal. 26-47), terdapat setidaknya 5 (lima) aspek utama yang dapat dianalisis untuk mendeskripsikan suatu *naval diplomacy*, yaitu, 1) *influencers* dan *influenced*, 2) *assets* dan *liabilities*, 3) *naval influence*, 4) taktik, dan 5) efek yang ditimbulkan oleh *naval diplomacy*. Aspek ini akan diintegrasikan ke dalam pembuatan model konseptual aktivitas dalam proses analisis SSM untuk memahami *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI.

SSM sebagai sebuah langkah metodologis pada dasarnya menawarkan pendekatan yang lebih bersifat *experienced-based knowledge*, artinya menekankan pada pentingnya penggalan informasi dan keinginan dari aktor-aktor di dunia nyata untuk kemudian dapat dirumuskan menjadi rekomendasi dalam rangka perbaikan atau peningkatan situasi problematis yang menjadi target penelitian (Hardjosoekarto, 2012). Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat belajar melalui refleksi kesadaran. Lebih lanjut Checkland dan Scholes (1990, hal. 16) menyatakan bahwa untuk dapat membangun pengetahuan dari pengalaman tersebut, “[i]t is absolutely essential to declare in advance an intellectual framewok which will be used in attempts to make sense of both situation and the researcher’s involvement in it.” Artinya, praktisi SSM harus berpijak pada kerangka konseptual dan teori yang menjadi *standing position* penulis sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini ditujukan agar keterlibatan penulis sebagai praktisi SSM dengan situasi problematis dapat didefinisikan. Dalam tulisan ini, teori *naval diplomacy* yang telah dikemukakan di atas adalah kerangka intelektual yang dipilih untuk menganalisis diplomasi angkatan laut dalam pengiriman Satgas Maritim TNI pada misi UNIFIL MTF.



Gambar 2. Tujuh (7) tahapan dalam Soft System Methodology
(Checkland & Scholes, 1990)

Karakteristik dari SSM salah satunya adalah bahwa metode ini berupaya untuk mengurai kompleksitas permasalahan dengan mengikuti prosedur dan tahapan analisis. Untuk melakukan analisis dengan menggunakan metode SSM, penulis melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai mana yang dapat dilihat dalam gambar di atas.

Tahapan (1) adalah *problem situation considered problematic*, yaitu penentuan masalah yang tidak terstruktur dan kompleks yang mana masalah-masalah tersebut masih memiliki banyak perspektif (*world views*). Tahapan ini adalah refleksi dari latar belakang kajian yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, tahapan (2) adalah *problem situation expressed*, yaitu menggambarkan kompleksitas permasalahan melalui *rich picture* untuk menangkap berbagai persepsi terkait permasalahan. *Rich pictures* diupayakan untuk dibuat selengkap mungkin untuk menunjukkan peta permasalahan, relasi antar aktor, dan pandangan-pandangan tentang permasalahan yang diteliti. Pembuatan *Rich Pictures* ditujukan untuk memahami pemilik isu dari pengiriman Satgas Maritim TNI dan bagaimana pandangannya terhadap permasalahan.

Tahapan (3) adalah *root definition of relevant purposeful activity systems*, yaitu dengan mendefinisikan akar permasalahan yang mencakup pandangan tertentu terhadap situasi yang menjadi masalah sesuai dengan perspektif yang relevan. Tahapan ini dibantu dengan pendefinisian CATWOE (*Customers, Actors, Transformation Process, Worldview, Owner* dan *Environmental Constrains*). *Customer* adalah pihak yang menerima manfaat dari proses transformasi atau perbaikan yang diinginkan. *Actor* adalah pihak yang dapat melakukan transformasi jika model yang diciptakan ini diaplikasikan pada *real world*. *Transformation Process* adalah aktivitas bertujuan (*purposeful activity*)

yang mencerminkan proses transformasi, peningkatan atau perbaikan. *Worldview* adalah paradigma yang menjustifikasi *root definition*. *Owner* adalah pengambil keputusan yang memiliki tanggungjawab terhadap upaya perbaikan maupun yang dapat menghentikan transformasi. *Environmental Constrains* adalah elemen di luar sistem yang dapat menjadi kendala dalam proses transformasi.

Tahapan (4) adalah *conceptual model of the systems named in the root definition*, yaitu tahapan membangun model konseptual untuk melakukan peningkatan, perbaikan maupun transformasi terhadap permasalahan. Model konseptual ini dibangun dengan menggambarkan *input* dan *output* dalam proses transformasi. Pada tahapan pembuatan model konseptual ini, penulis menggunakan konsep-konsep kunci dari teori *naval diplomacy* untuk membantu penyusunan model konseptual.

Tahapan (5) adalah *comparison of model and real world*, yaitu tahapan dimana penulis membandingkan model yang telah dibangun dengan *real world*. Tahapan ini langsung diikuti dengan tahapan (6) yaitu *changes: systematically desirable; culturally feasible*, dimana penulis melakukan penilaian dengan dasar hasil wawancara dengan pemangku kepentingan tentang peningkatan atau transformasi yang secara nyata dapat dicapai untuk memperbaiki situasi (*problem situation*). Terakhir, pada tahapan (7), *action to improve problem situation* adalah tahapan mengimplementasikan rencana aksi untuk melakukan transformasi tersebut. Kajian ini tidak sampai pada tahapan (7) karena implementasi saran perbaikan dari kajian ini sangat bergantung pada *owners of the issue addressed*.

PEMBAHASAN

Problem Situation Expressed.²

Menurut Checkland (1990, hal. 26), analisis intervensi merupakan analisis pada level siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang telah dikemukakan. Dalam analisis intervensi ini akan dijabarkan pihak-pihak yang berperan sangat penting dalam situasi yang menjadi masalah dalam penelitian. Pihak-pihak ini dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Klien (*Clients*), Praktisi (*Practitioners*), Pemilik Isu (*Owners of the issue addressed*).

Adapun pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya intervensi dalam kajian ini dapat disimpulkan menjadi tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Intervensi dalam Rangka Pembuatan *Rich Pictures*

Pihak-pihak	Definisi	Pihak-pihak dalam Penelitian
<i>Client (C)</i>	Individu, kelompok atau entitas yang menyebabkan terjadinya intervensi terhadap situasi.	Penulis
<i>Practitioner (P)</i>	Individu atau kelompok yang melakukan penelitian dengan metode SSM.	Penulis
<i>Owner (O)</i>	Pihak-pihak yang berperan sebagai pemilik isu (<i>owners of the issue addressed</i>). Pihak-pihak tersebut adalah individu atau entitas yang berkepentingan atau yang terkena dampak dari upaya perbaikan situasi problematis.	<p>Makro: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p> <p>Mikro: Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri</p>

Melalui penelusuran terhadap pendapat *owners* yaitu Kemhan RI, Kemlu RI dan TNI muncul pernyataan, pendapat dan masalah yang dikemukakan. Kemlu RI pada dasarnya menyadari bahwa Satgas Maritim TNI merupakan sebuah diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan peran global Indonesia (Fikri Cassidy, komunikasi personal, 13 Oktober 2016). Kemhan RI juga berpendapat selaras bahwa Satgas Maritim TNI meningkatkan citra Indonesia dan mendukung berbagai agenda politik luar negeri Indonesia. Dari sisi TNI sendiri menganggap bahwa *naval diplomacy* Satgas Maritim TNI secara kualitas sudah baik (Adityawarman dan Siagian, komunikasi personal, 17 Oktober 2016). Sejalan dengan pengalaman Menteri Pertahanan 2009-2014, Purnomo Yusgiantoro (Komunikasi personal, 26 Oktober 2016) dan personil yang pernah bertugas, respon PBB dan Lebanon yang positif terhadap pengiriman Satgas Maritim TNI. Namun pihak TNI (A.Jaya, A. Octavian, M. Roytamus, komunikasi personal, 2016) dan pakar dari Kemlu RI Leonard Hutabarat (Komunikasi Personal, 5 Februari 2017) cenderung sepakat bahwa Indonesia perlu meningkatkan kuantitas agar Satgas Maritim TNI menjadi simbol komitmen yang kuat. Satgas Maritim TNI melaksanakan *naval diplomacy* (P) melalui penggunaan kapal perang yang memiliki kualitas dan kuantitas relevan sebagai instrumen diplomasi (Q) dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan peran global Indonesia sebagai *middle power* (R). Secara detail gambaran umum persepsi masing-masing pihak tersebut dapat dilihat melalui *rich pictures* pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Rich Pictures dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI



Root Definition.³

C: Customers

Indonesia, Satgas Maritim TNI

A: Actors

Kemlu RI, Kemhan RI, TNI

T: Transformation

Meningkatnya kapasitas (jumlah) dan kapabilitas (kemampuan SDM) Satgas Maritim TNI sebagai instrumen *naval diplomacy* yang relevan (*appropriate*) untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di PBB dan Lebanon.

W: Worldview

Faktor umum yang mempengaruhi potensi *naval diplomacy* dalam mencapai tujuan tertentu adalah kepastian (*appropriateness*) dari aspek kualitas dan kuantitas kapal perang tersebut.

O: Owners

Presiden RI, TNI, Kemhan RI dan Kemlu RI

E: Environmental Constrains

Ketersediaan anggaran/pendanaan, koordinasi antar *stakeholder*, diakhirinya misi UNIFIL,

Efficacy

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satgas Maritim TNI dalam penugasan UNIFIL MTF akan memaksimalkan potensi *naval diplomacy* untuk menciptakan pengaruh melalui prestise Indonesia

Efficiency

Naval diplomacy yang dilaksanakan Satgas Maritim TNI dapat menjadi simbol totalitas Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia sehingga dapat mendorong tujuan nasional lainnya di PBB.

Effectiveness

Peningkatan kuantitas Satgas Maritim TNI memperlihatkan peningkatan prestise dan *bargaining position* secara nyata.

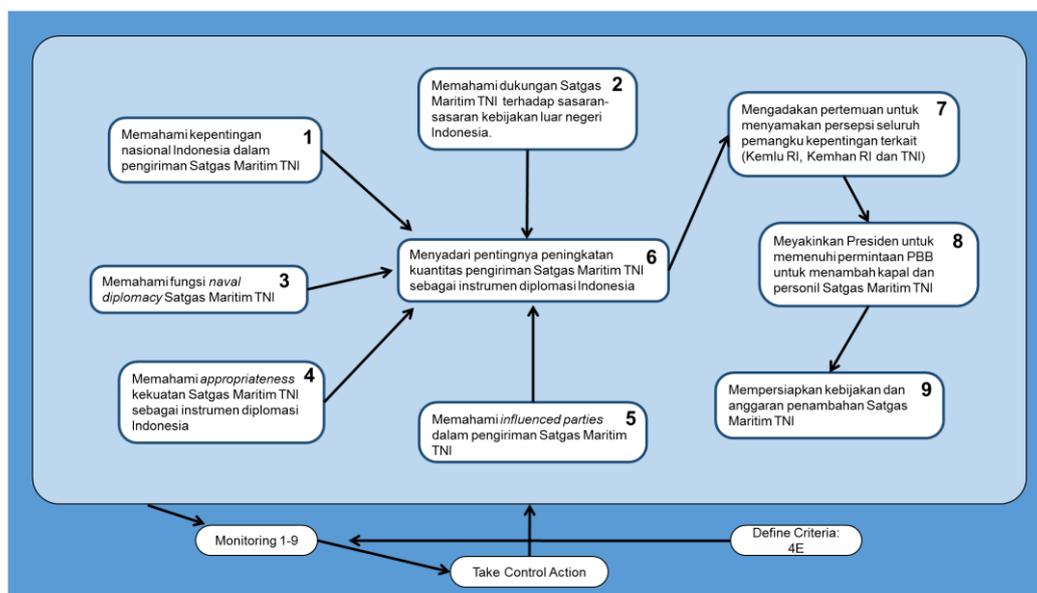
Elegance

Kebijakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Satgas Maritim TNI didukung oleh seluruh pemangku kepentingan

Conceptual Model.⁴

Pembuatan model konseptual sebagai tahapan keempat (*conceptual models of the systems -holons- named in the root definition*) SSM ditujukan untuk mengurai permasalahan yang telah diekspresikan melalui *root definition* yang telah dipilih. Model konseptual ini berbentuk aktivitas-aktivitas. Dalam tulisan ini aktivitas-aktivitas diambil dari kebutuhan untuk menjelaskan pengiriman Satgas Maritim TNI secara teoritik, membangun argumentasi pentingnya peningkatan dalam pengiriman Satgas Maritim TNI, dan memberikan arah implementasi peningkatan tersebut.

1. Memahami kepentingan nasional Indonesia dalam pengiriman Satgas Maritim TNI
2. Memahami dukungan Satgas Maritim TNI terhadap sasaran-sasaran kebijakan luar negeri Indonesia.
3. Memahami fungsi *naval diplomacy* Satgas Maritim TNI
4. Memahami *appropriateness* kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi
5. Memahami *influenced parties* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI
6. Menyadari pentingnya peningkatan kuantitas pengiriman Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi Indonesia
7. Mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait (Kemlu RI, Kemhan RI dan TNI)
8. Meyakinkan Presiden untuk memenuhi permintaan PBB untuk menambah kapal dan personel Satgas Maritim TNI
9. Mempersiapkan kebijakan dan anggaran penambahan Satgas Maritim TNI



Gambar 4. Model Konseptual Aktivitas

Perbandingan Model Konseptual dan Keadaan Empirik.⁵

Dalam prosedur SSM idealnya perbandingan model konseptual dengan dunia nyata disajikan dalam bentuk tabel. Namun demikian, merujuk pada model konseptual yang secara umum adalah proses refleksi teoritis dan upaya membangun argumentasi, perbandingan konseptual dengan dunia nyata disajikan secara naratif agar menghilangkan kesan kaku dan lebih mudah dipahami.

Keentingan Nasional Indonesia

Pengiriman Satgas Maritim TNI secara spesifik belum dipandang sebagai sebuah strategi *naval diplomacy* Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas. Sementara itu, jelas bahwa beberapa negara seperti Brasil, Bangladesh, dan Tiongkok telah menjadikan pengiriman pasukan perdamaian sebagai suatu strategi pencapaian kepentingan nasionalnya. Partisipasi Brasil dalam pengiriman satgas maritimnya di UNIFIL MTF ditujukan sebagai strategi *rising power maintenance* untuk tetap terlibat dalam konflik Timur Tengah (Abdenur, 2016). Bangladesh memiliki motivasi lebih kepada untuk mencari insentif dari PBB melalui *reimbursement* (Riaz dan Rahman, 2016). Di lain pihak, Tiongkok memiliki motivasi ekonomi yang cukup kuat dalam pengiriman pasukan perdamaianya (Lawson, 2011).

Keentingan nasional Indonesia dalam mengirim pasukan perdamaian termasuk Satgas Maritim TNI secara normatif adalah untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Secara teoretis, sejalan dengan gagasan Frankel⁶,

kepentingan menjaga perdamaian dunia termasuk ke dalam golongan kepentingan objektif Indonesia, karena didasarkan pada nilai dasar konstitusi Indonesia pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat. Kepentingan nasional ini menjadi justifikasi normatif pemerintah dalam pelaksanaan pengiriman pasukan perdamaian.

Selanjutnya, kepentingan nasional subjektif Indonesia adalah untuk memperkuat diplomasi *middle power*. Dalam konteks ini, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Renstra Kemlu RI) tahun 2015-2019, Indonesia ingin menempatkan diri sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif. Dalam rangka mencapai kepentingan tersebut, Kemlu RI juga menetapkan strategi politik luar negeri Indonesia dengan jalan memperkuat diplomasinya di PBB; meningkatkan partisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian; dan meningkatkan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Pengiriman Satgas Maritim TNI menjadi relevan untuk mencapai strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut dipandang dari bobotnya sebagai pasukan perdamaian maritim satu-satunya PBB dan tugas diplomatiknya sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 9c.

Pengiriman Satgas Maritim untuk Mendukung Agenda Kebijakan Luar Negeri

Agenda politik luar negeri Indonesia secara umum adalah meningkatkan pengaruh secara terus menerus di dunia internasional untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi pencapaian kepentingan nasional. Untuk meningkatkan pengaruh tersebut, maka Indonesia perlu meningkatkan peran globalnya. Sejalan dengan gagasan tersebut, kerangka untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat global sebagai *middle power* mengacu pada Renstra Kemlu RI tahun 2015-2019 (2015, 47) tentang arah kebijakan dan strategi politik luar negeri adalah dengan 1) melaksanakan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah, 2) meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian, dan 3) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif.

Berdasarkan Renstra tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) agenda politik luar negeri Indonesia yang relevan dengan pengiriman Satgas Maritim TNI. Empat agenda politik ini secara eksplisit maupun implisit tertuang dalam Renstra Kemlu RI, arahan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan didukung oleh pernyataan yang disampaikan pihak-pihak pemangku kepentingan yang relevan dengan pengiriman Satgas Maritim TNI dalam rangka mendorong tercapainya kepentingan Indonesia tersebut.

Pertama, Satgas Maritim TNI Pengiriman Satgas Maritim TNI menjadi salah satu kontributor untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kepemimpinan Indonesia di dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan pencapaian yang dapat menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di PBB (P. Yusgiantoro, komunikasi personal, 26 Oktober 2016).

Kedua, *pengiriman* Satgas Maritim TNI dalam misi UNIFIL di sini memiliki posisi sebagai modal dalam upaya diplomasi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Modal ini disalurkan melalui peningkatan citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia dan pengembangan hubungan baik Indonesia dengan Lebanon. Hal ini membuka kesempatan Indonesia untuk mendapatkan dukungan baik dari Lebanon maupun negara-negara lain dalam pencalonan tersebut (A. Octavian dan P. Yusgiantoro, komunikasi personal, 2016).

Ketiga, pengiriman Satgas Maritim TNI ini menunjukkan urgensi Indonesia untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah, terutama Lebanon, agar posisi Indonesia di Timur Tengah semakin kuat. Cassidy (Komunikasi personal, 13 Oktober 2016) dari Kemlu RI menyampaikan bahwa konflik Lebanon tersebut dalam derajat tertentu dapat menjadi representasi keterlibatan Indonesia secara pro aktif dalam resolusi konflik Timur Tengah. Gagasan ini juga didukung oleh Octavian (Komunikasi personal, 27 Oktober 2016) bahwa kepentingan Indonesia dengan mengirimkan Satgas Maritim TNI adalah sebagai *signifier* untuk menunjukkan solidaritas terhadap Lebanon. Namun demikian, baik Cassidy maupun Octavian menekankan bahwa misi pemeliharaan perdamaian sifatnya imparisial. Dengan demikian, agenda tersebut tidak dapat diekspresikan terhadap publik internasional. Hanya saja, persepsi dan pandangan positif Lebanon dan negara Timur Tengah lainnya dari pengiriman Satgas Maritim TNI di sana dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Keempat, pengiriman Satgas Maritim TNI pada misi perdamaian maritim UNIFIL MTF juga memiliki implikasi upaya diplomasi untuk memperluas jaringan negara sahabat Indonesia. Salah satu aktivitas dalam pengiriman Satgas Maritim TNI adalah dilaksanakannya *courtesy call*⁷ pada pelabuhan-pelabuhan persinggahan baik dalam perjalanan dari Indonesia menuju Lebanon maupun Lebanon ke Indonesia. Kunjungan antar Angkatan Laut ini tentu juga meningkatkan *trust* antara Indonesia dengan negara lain (M. Roytamus, komunikasi personal, 14 Desember 2016). Rasa saling percaya atau yang dikenal dengan *confidence building measures* (CBMs) sejatinya merupakan langkah-langkah yang diambil untuk membangun rasa saling percaya di antara pihak-

pihak yang berkonflik. Namun dalam konteks ini, Satgas Maritim TNI membangun CBMs dalam rangka secara konsisten mempererat hubungan bersahabat dengan negara lain melalui Angkatan Laut dengan harapan mencegah konflik yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI pada Misi UNIFIL

Pengiriman Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Booth memahami *naval diplomacy* sebagai sebuah strategi *naval influence politics* dari pada *naval power politics* yang lebih dekat dengan penggunaan ancaman kekerasan. Satgas Maritim TNI dalam konteks ini berperan dalam kerangka *naval influence politics* di mana pengiriman satgas tersebut tidak memiliki tujuan menciptakan ancaman, namun menciptakan kolaborasi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Alit Jaya bahwa *naval diplomacy* dikemas secara komprehensif melalui berbagai aktivitas-aktivitas Angkatan Laut yang positif (A. Jaya, komunikasi personal, 14 Desember 2016). Secara teoretis, pendapat Alit Jaya terkonfirmasi oleh Both Turner dan Luttwak (dalam Mière, 2014, 22-23) yang memposisikan *diplomacy* untuk membangun hubungan yang kolaboratif. Keikutsertaan dalam operasi multinasional dan latihan bersama dapat meningkatkan hubungan antar negara di satu sisi, di sisi lain meningkatkan kemampuan Angkatan Laut itu sendiri.

Menurut Booth (1977, 40), terdapat 3 taktik dasar pengerahan armada sebagai upaya *naval diplomacy* dalam kerangka *naval influence politics*, yaitu *naval aid*, *operational visits*, dan *specific goodwill visits*. Dilihat sebagai sebuah upaya *naval diplomacy*, Satgas Maritim TNI ternyata memiliki peran dalam ketiga bentuk *naval diplomacy* tersebut.

Pertama, Satgas Maritim TNI sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada PBB untuk melaksanakan misi di Lebanon. Bentuk *naval diplomacy* melalui *naval aid* tersebut dapat membangun akses dan hubungan kerjasama dengan negara atau entitas target. Dalam konteks ini, maka Satgas Maritim TNI juga berperan untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Lebanon dan meningkatkan posisi Indonesia di PBB. Sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan citra internasional, bantuan Indonesia terhadap PBB dan Lebanon sebagai pasukan perdamaian setidaknya berkontribusi terhadap pandangan positif dunia terhadap Indonesia.

Kedua, sebagai bentuk *operational calls*, Satgas Maritim TNI melaksanakan kunjungan di beberapa pelabuhan dunia untuk melakukan *maintenance*, penambahan peralatan dan penambahan logistik selama perjalanan lintas laut Indonesia-Lebanon. Kunjungan seperti ini dapat dimanfaatkan secara bertahap untuk membangun prestise dan posisi tawar negara pengunjung, sehingga meningkatkan pengaruh terhadap negara target. Secara praktis, fungsi operasional ini telah dimanfaatkan oleh Satgas Maritim TNI untuk keperluan teknis. Namun secara politis, belum ada arahan dari Kemlu RI sebagai pemangku kepentingan utama dalam hubungan luar negeri Indonesia, untuk memanfaatkan fungsi tersebut.

Ketiga, sebagai bentuk *specific goodwill visit*, Satgas Maritim TNI melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat diplomatik, seperti menyelenggarakan *courtesy call*, *cocktail party* dan kegiatan seremonial lain. Alit Jaya sebagai mantan Dansatgas Maritim TNI menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan sambutan yang baik di negara-negara yang dikunjungi semasa lintas laut Lebanon-Indonesia, terutama di Pakistan dan India (A. Jaya, komunikasi personal, 14 Desember 2016). Dari pengalaman tersebut, dapat dipahami bagaimana posisi Indonesia di negara-negara yang dikunjungi menjadi semakin baik dan meningkatkan kualitas persahabatan antar negara dan antar Angkatan Laut. Satgas Maritim TNI juga memanfaatkan kunjungan-kunjungan tersebut untuk menawarkan beragam kerja sama dalam rangka meningkatkan posisi Indonesia di negara-negara tersebut.

Dapat dipahami bahwa melalui konsep taktis *naval diplomacy*, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang dapat dipengaruhi (*influenced parties*). *Influenced parties* dari pengiriman Satgas Maritim TNI cukup luas mencakup PBB sebagai organisasi internasional, Lebanon sebagai negara target penerima manfaat, dan negara-negara tempat Satgas Maritim TNI melaksanakan muhibah.

Perspektif Kepantasan Satgas Maritim TNI sebagai Instrumen Naval Diplomacy

Naval diplomacy pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap prestise yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari *naval diplomacy* dapat memberikan makna yang berbeda-beda (Booth, 1977, 29). Kekuatan armada yang besar belum tentu memiliki pengaruh yang besar, sebaliknya armada kecil sekalipun belum tentu memberikan pengaruh kecil. Untuk

itu, penting untuk melakukan analisa terhadap kepantasan dari suatu armada sebagai instrumen diplomasi sesuai dengan konteks dimana, kapan dan bagaimana armada kapal perang tersebut dikerahkan.

Komponen utama dari penugasan Satgas Maritim TNI adalah kapal perang jenis korvet dan personel TNI AL. Sebagai instrumen diplomasi, kapal perang secara teoritik memiliki 7 (tujuh) aset dasar yaitu fleksibilitas, pengendalian, mobilitas, kemampuan proyeksi, potensi akses, simbolisme dan ketahanan (Booth, 1977, hal. 33-36). Dalam konteks pengiriman Satgas Maritim TNI, terdapat lima dari tujuh aset dasar dalam teori *naval diplomacy* yang relevan untuk menilai Satgas Maritim TNI. Analisis tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Modalitas Satgas Maritim TNI sebagai Instrumen Diplomasi

Modalitas	Relevansi Satgas Maritim TNI
Fleksibilitas	Dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan operasi jenis lainnya (SAR dan VBSS).
Mobilitas	Cukup tinggi dan relevan dengan misi UNIFIL MTF
Kemampuan Proyeksi	Menunjukkan kemampuan <i>long distance operation</i>
Potensi akses	Dapat melakukan muhibah (<i>goodwill visit</i>) kepada negara-negara sahabat
Simbolisme	Sebagai <i>signifier</i> dan <i>prestige</i> Satgas Maritim TNI dibandingkan dengan satgas lain dalam UNIFIL MTF sama

Dalam sejarah pengiriman Satgas Maritim, TNI telah mengirimkan kapal *Ship Integrated Geometrical Modularity Approach SIGMA Class* yaitu KRI Diponegoro (365) dan KRI Sultan Iskandar Muda (367) dan *Multi Role Light Frigate (MRLF) Class* yaitu KRI Bung Tomo (357) dan KRI John Lie (358). KRI Diponegoro (365). KRI kelas SIGMA dan MRLF memenuhi aspek fleksibilitas, mobilitas, kemampuan proyeks, dan potensi akses (Choiriah, 2015). Tugas-tugas kemanusiaan yang dapat dilaksanakan kedua jenis armada tersebut meliputi *search and rescue*, *VBSS (visit, board, search and seizure)*, *winching* (penderekan), dan kemampuan untuk melaksanakan pemantauan udara karena dilengkapi dengan helikopter (Koarmatim, 2015).

Aspek simbolisme adalah aspek terpenting dalam analisis kepantasan Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi. Kondisi bahwa satgas tersebut berada di bawah Kendali PBB hampir mendegradasi banyak potensi Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi negara dalam kerangka *naval diplomacy*. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kuantitas dan kualitas KRI dalam Satgas Maritim TNI dapat

memperlihatkan prestise Indonesia dan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Simbolisme menurut Booth (1977, hal. 36) adalah karakter kapal perang yang mampu menjadi pemberi sinyal politis. Kapal perang dengan jenis paling besar atau jumlah yang besar secara khusus akan lebih berguna dan menjadi pemberi sinyal serta representasi niat, komitmen dan kekuatan negara. Satgas Maritim TNI dalam hal ini mengirimkan kapal kelas SIGMA dan MRLF yang masuk ke dalam jenis korvet, yaitu kapal perang yang berukuran lebih kecil dari jenis fregat, namun lebih besar dari kapal patroli (*fast patrol boat*). Dibandingkan dengan negara pengirim kapal lainnya, Satgas Maritim TNI belum memiliki keunggulan signifikan. Tabel perbandingan jumlah dan tipe kapal di bawah menunjukkan bahwa sebagai *naval presence* Satgas Maritim UNIFIL relevan untuk menggantikan kapal perang Israel yang digunakan untuk memblokade laut Lebanon tahun 2006. Namun demikian, untuk Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa masih kurangnya bobot Satgas Maritim TNI sebagai simbol prestise dari sisi kuantitas dan kapasitas kapal perang. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, kapal markas jenis fregat dikirim oleh Brasil yang sekaligus menjadi MTF *Commander*. Fregat yang lain juga dikirim oleh Bangladesh dan Yunani. *Kedua*, jenis korvet juga dikirim oleh sebagian besar satgas dalam UNIFIL MTF dengan kemampuan yang relatif sama. *Ketiga*, jumlah armada KRI yang dikirim hanya satu. Sementara Bangladesh mengirim dua kapal kelas fregat leopard dan *patrol boat*. Dalam sejarah perjalanan operasi UNIFIL MTF tersebut, Jerman bahkan sempat mengirim 3 (tiga) kapal perangnya.

Tabel 3. Perbandingan Kekuatan Satgas Maritim UNIFIL

No.	Negara TCC UNIFIL MTF	Jumlah Kapal Perang	Nama Kapal	Tipe
1	Bangladesh	2	BNS Ali Haider Leopard-class BNS Nirmul Durjoy-class	Frigate Large patrol craft
2	Brasil	1	F43 Liberal Niteroi-class	Frigate
3	Jerman	1	F260 Braunschweig-class	Corvette
4	Yunani	1	HS Nikiforos Elli-class	Frigate
5	Turki	1	F505 TCG Bafra	Corvette
6	Indonesia	1	KRI Bung Tomo (357) MRLF-class	Corvette
Kapal Israel dalam Blokade Laut Lebanon 2006				
1	Israel	2	INS Hanit Sa'ar-5 class INS Lahav Sa'ar-5 class	Corvette Corvette

Sumber: Olahan penulis.

SIMPULAN

Desireable Change.⁸

Memahami kepentingan nasional, dukungan terhadap sasaran kebijakan luar negeri Indonesia, fungsi *naval diplomacy*, dan *appropriateness* Satgas Maritim TNI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan nasional yang menggerakkan Indonesia untuk mengirim Satgas Maritim TNI adalah untuk menjaga perdamaian dunia sebagai mandat konstitusi dan meningkatkan peran global Indonesia sebagai *middle power*. Penjabaran tentang perspektif *appropriateness* Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* pada bahasan perbandingan model konseptual dengan dunia nyata menggiring pada saran tindak untuk *owners of the issue addressed* bahwa untuk meningkatkan relevansi Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi dan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pencapaian kepentingan nasional, maka perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kuantitas armada kapal perang Indonesia di UNIFIL. Peningkatan kuantitas ini akan menyempurnakan relevansi fungsi prestise Indonesia yang diwakili oleh Satgas Maritim TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdenur, A. E. (2016). Rising Powers in Stormy Seas: Brazil and the UNIFIL Maritime Task Force. *International Peacekeeping*, 23(3), 389-415.
- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy (Routledge Revivals)*. London: Routledge.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Burge, S. (2015). *An Overview of the Soft Systems Methodology*.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Choiriah, M. (2015, Agustus 27). *Peristiwa: Ini Persenjataan Canggih KRI Bung Tomo Selama Bertugas di Lebanon*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-persenjataan-canggih-kri-bung-tomo-selama-bertugas-di-lebanon.html>
- Fardah. (2011, Desember 20). *RI Gearing Up for Bigger Role in UN Peacekeeping Missions*. Retrieved from Antara News: <http://static.antaraneews.com/en/news/78581/ri-gearing-up-for-bigger-role-in-un-peacekeeping-missions>

- Farewell Courtesy Call Dansatgas Maritim TNI. (2017, Januari 16). *TNI AL*. Retrieved from <http://www.tnial.mil.id/News/Seremonial/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/22820/Default.aspx>
- Hardjosoekarto, S. (2012). *Soft Systems Methodology (Metodologi Serba Sistem Lunak)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019*. Jakarta: Kemlu RI
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon.
- Koarmatim. (2015). *Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-G/UNIFIL*. Surabaya: Koarmatim TNI AL.
- Lawson, B. (2011). *The Price of Peace: A Quantitative Analysis of Economic Interests and China's Involvement in United Nations Peacekeeping Operations*.
- Mengenal 4 Korvet Kelas SIGMA TNI AL. (2011, Juli). *Artileri*. Retrieved from <http://www.artileri.org/2014/03/4-korvet-kelas-sigma-tni-al.html>
- Mière, C. L. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.
- Reynolds, C. J. (2012). Diplomatic Gastronomy: the Convivial Nature of The Power of Prestige, Cultural Diplomacy and Soft Power.
- Riaz, A., & Rahman, M. S. (2016). *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh*. London: Routledge.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2005 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wening, A. A. (2016, September 1). KRI Bung Tomo-357 Ungguli Kapal Perang Negara Lain. *Kabar 24*. Retrieved from <http://kabar24.bisnis.com/read/20160901/15/580186/hebat-kri-bung-tomo-357-ungguli-kapal-perang-negara-lain>

CATATAN BELAKANG

¹ *Line of Buoy* (LoB) adalah batas paling selatan dari perairan yang menjadi sengketa antara Israel dan Lebanon. LoB ditetapkan oleh Israel ditandai dengan *buoy* berwarna kuning yang ditarik sejauh 3 NM kearah laut. Atas permintaan Lebanon, Satgas UNIFIL MTF melaksanakan patroli di sekitar perairan tersebut untuk mengimbangi patroli kapal yang dilakukan Angkatan Laut Israel di wilayah laut yang dipersengketakan.

² Bagian ini merefleksikan tahapan kedua SSM (*problem situation expressed*)

³ Bagian ini merefleksikan tahapan ketiga SSM (*root definition of relevant system*)

⁴ Bagian ini merefleksikan tahapan keempat SSM (*conceptual models of the systems -holons- named in the root definition*)

⁵ Bagian ini merefleksikan tahapan kelima SSM (*comparison of models and real world*)

⁶ Frankel (dalam Burchill, 2005) mengklasifikasikan kepentingan nasional terdiri dari objektif dan subjektif. Kepentingan nasional objektif adalah kepentingan yang berkaitan dengan sejarah, ideology, geografi dan atribut permanen lainnya yang melekat dalam negara. Sementara itu, kepentingan subjektif adalah kepentingan nasional yang lebih dinamis merujuk pada definisi dan sikap elit terhadap dinamika politik.

⁷ *Courtesy call* dalam konteks diplomasi adalah pertemuan formal diplomat atau perwakilan negara yang berkunjung atau melaksanakan pertemuan ramah-tamah baik dengan kepala negara maupun dengan pejabat pemerintahan lainnya. Pertemuan ini secara konseptual memiliki nilai simbolis. Meskipun *courtesy call* pada umumnya tidak membicarakan isu spesifik, namun tetap memiliki makna diplomatis yang cukup kuat.

⁸ Bagian ini merefleksikan tahapan keenam SSM (*changes*), yaitu penyimpulan hasil dan saran tindakan untuk pihak terkait (Kemlu RI, Kemhan RI dan TNI).